

LAPORAN THESIS
PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DALAM
PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DI
WILAYAH PERBATASAN
(STUDI PADA PUSKESMAS BADAU KABUPATEN KAPUAS
HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT)



DEWI MELLISSA

NIM 21.C2.0066

PROGRAM MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2025

**PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DALAM PEMENUHAN HAK
PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH PERBATASAN
(STUDI PADA PUSKESMAS BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT)**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

Dewi Mellissa

21.C2.0066

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Tidak meratanya pemenuhan tenaga Kesehatan terutama pada tenaga dokter memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pelayanan Kesehatan di daerah perbatasan yaitu menyebabkan Keterbatasan Akses ke Perawatan Medis. Warga di daerah perbatasan seringkali kesulitan mendapatkan akses perawatan medis yang memadai karena kurangnya dokter. Hal ini membuat pasien harus menempuh jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap di kota besar. Tenaga medis, yakni dokter umum, merupakan tenaga sentral dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Belum tercukupinya tenaga medis berdampak pada pelayanan Puskesmas belum beroperasi selayaknya, sebagai representasi negara dan penyelenggara, bertanggung jawab memenuhi kecukupan tenaga medis. Tenaga medis di Puskesmas Badau Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai standar minimal tenaga pada Puskesmas. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang pengaturan, pelaksanaan dan kendala Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kecukupan tenaga medis di Puskesmas Badau Kabupaten Kapuas Hulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode penelitian kualitatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan deskriptif analitik yang menggambarkan dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam memenuhi kecukupan tenaga medis di Puskesmas Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan dari hasil wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan di bidang pemerintahan daerah mengatur secara umum terkait kesehatan sebagai urusan pemerintahan otonom yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten. Sedangkan, pengaturan di bidang kesehatan secara umum mengatur tanggung jawab pemerintah daerah atas tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai *responsibility* belum terlaksana dengan baik dalam memenuhi kecukupan tenaga medis. Adanya kendala terkait ketidaksesuaian norma kelembagaan Puskesmas Badau dengan norma di atasnya, larangan pengangkatan tenaga non aparatur sipil negara, dan kurangnya minat tenaga medis. Kesimpulan penelitian ini bahwa terdapat pertentangan secara hierarki perundangan-undangan baik dalam pengaturan pemerintah daerah maupun kesehatan terkait pemerataan tenaga Kesehatan medis yang berdampak tidak terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah pada Puskesmas Badau dengan adanya kendala baik aspek yuridis dan non yuridis.

Kata kunci: pemerataan tenaga medis, pelayanan kesehatan, Puskesmas Perbatasan.

ABSTRACT

The uneven supply of health workers, especially doctors, has a very significant impact on health services in border areas, namely causing limited access to medical care. Residents in border areas often have difficulty getting access to adequate medical care due to a lack of doctors. This means that patients have to travel long distances to more complete health facilities in big cities. Medical personnel, namely general practitioners, are the central staff in providing health services at Community Health Centers. The lack of sufficient medical personnel has an impact on Puskesmas services not yet operating properly. As representatives of the state and administrators, they are responsible for providing adequate medical personnel. Medical personnel at the Badau Community Health Center, Kapuas Hulu Regency do not meet the minimum standards for personnel at the Community Health Center. Therefore, this research discusses the regulation, implementation and constraints of the Regional Government in carrying out its responsibilities to fulfill adequate medical personnel at the Badau Community Health Center, Kapuas Hulu Regency.

This research uses a sociological juridical approach with qualitative research methods. The specification of this research is an analytical descriptive that describes and analyzes the responsibilities of the Kapuas Hulu Regency Government in meeting the adequacy of medical personnel at the Badau Community Health Center, Kapuas Hulu Regency. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data was obtained from field studies from interviews with sources, while secondary data was obtained from literature studies consisting of primary, secondary and tertiary legal materials.

The results of the research and discussion show that regulations in the regional government sector generally regulate health as an autonomous government matter organized by the district regional government. Meanwhile, regulations in the health sector generally regulate the responsibility of local governments for the availability of adequate health service facilities. The responsibility of the Regional Government as a responsibility has not been carried out well in providing sufficient medical personnel. There are obstacles related to the inconsistency of the Badau Community Health Center's institutional norms with the norms above, the prohibition on appointing non-state civil service personnel, and the lack of interest in medical personnel. The conclusion of this research is that there is a conflict in the hierarchy of laws both in regional government and health regulations regarding the distribution of medical health personnel which has the impact of not carrying out the regional government's responsibilities at the Badau Community Health Center due to obstacles in both juridical and non-juridical aspects.

Key words: equal distribution of medical personnel, health services, Border Health Center.